

## **Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Digital Di Ibu Kota Nusantara Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Indonesia**

**Catherine Florencia Mocc<sup>1</sup>, Nathanie Asher Tangjaya<sup>2</sup>, Charles William<sup>3</sup>, Abednego Nelson<sup>4</sup>, Steven Adrisa<sup>5</sup>, Gabriel Denli<sup>6</sup>, Yesaya Abraham<sup>7</sup>**

Program Studi Manajemen  
Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial  
Universitas Matana Tangerang

Email: catherine.mocc@student.matanauniversity.ac.id, nathanie.tangjaya@student.matanauniversity.ac.id, charles.william@student.matanauniversity.ac.id, abednego.nelson@student.matanauniversity.ac.id, steven.adrisa@student.matanauniversity.ac.id, gabriel.tarigan@student.matanauniversity.ac.id, yesaya.timotius@student.matanauniversity.ac.id<sup>1234567</sup>

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN: 3026-6874 Vol: 1, Nomor: 2, Desember 2023 Halaman :536-542	<i>Indonesia moved its national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. Moving the National Capital is one of the strategies to improve better and more advanced state administration. In moving the National Capital, digital transformation is accelerated through the digital economy, which plays an important role in encouraging sustainable economic growth in Indonesia. This study explains the impacts and challenges of developing digital economic infrastructure in the Indonesian capital on the national economy. This research was conducted using a qualitative research method through literature study which aims to analyze the role of technological infrastructure in building digital economic infrastructure in the capital city of the archipelago. The research results show that the development of digital economic infrastructure has a positive impact on national economic growth, namely that it can help increase GDP and increase employment. However, this research also identified that there are several obstacles and challenges that need to be overcome in implementing digital economic infrastructure, such as: cyber security, inequality in the use of technology, gaps in access, and the policies and regulations that are created. This study has evaluated existing policies and provided recommendations for creating more effective strategies to maximize positive impacts and minimize negative impacts on digital economic development in the Indonesian capital. This research is expected to provide an important contribution to understanding the role of digital economic infrastructure in driving sustainable economic growth in Indonesia.</i>
<b>Keywords:</b> Digital Transformation Economy IKN	

### **Abstrak**

*Indonesia melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu Kota Negara ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan ketatanegaraan yang lebih baik dan maju. Dalam pemindahan Ibu Kota Negara ini dilakukan akselerasi transformasi Digital melalui ekonomi digital yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Studi ini memaparkan mengenai dampak dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara terhadap ekonomi nasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur teknologi dalam membangun infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur ekonomi digital memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dapat membantu meningkatkan PDB dan peningkatan tenaga kerja. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu diatasi dalam implementasi infrastruktur ekonomi digital, seperti : keamanan siber, ketidaksetaraan dalam pemanfaatan teknologi, kesenjangan akses, hingga kebijakan dan regulasi yang dibuat. Studi ini telah mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk membuat strategi yang lebih efektif untuk dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara.*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting akan pemahaman tentang peran infrastruktur ekonomi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Transformasi Digital, Ekonomi, IKN

## PENDAHULUAN

Meningkatnya arus urbanisasi menimbulkan permasalahan baru bagi perkotaan. Mulai dari sampah, pendidikan, transportasi, sosial ekonomi, kebencanaan, dan kesehatan. Di sisi lain, masyarakat yang semakin modern dan mapan mempunyai segudang harapan, seperti lingkungan hidup dan kerja yang nyaman, ruang publik yang memadai, dan kemudahan dalam mengelola segala bentuk pelayanan publik.

Indonesia berencana untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan ketatanegaraan yang lebih baik dan maju. Indonesia yang sudah sekian dekade menjadi negara yang *java-centric* di mana pembangunan hanya berpusat pada wilayah Jawa terutama kota Jakarta mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan tata kelola yang sangat tinggi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya. Penumpukan dan kepadatan penduduk di ibu kota Jakarta yang semakin parah menjadikan Jakarta semakin *chaos* dan semakin kurang efektif dalam penatalayanan negara. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap kemacetan lalu lintas di Jakarta yang juga penuh isu dimana Jakarta semakin tenggelam, tercemar, dan padat.

Pemindahan ibu kota ini sebenarnya sudah direncanakan menjadi suatu wacana sejak zaman kepemimpinan Soekarno. Namun, rencana pemindahan ibu kota ini masih menjadi wacana hingga masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Wacana pemindahan ibu kota negara ini baru digarap serius menjadi pilar pengembangan negara sejak masa kepresidenan Joko Widodo pada putaran periode kedua ketika Presiden Joko Widodo mengemukakannya dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Adapun pertimbangan Kalimantan Timur yang dipilih menjadi Ibu Kota Negara, yaitu untuk pemerataan secara menyeluruh negara Indonesia baik dari aspek infrastruktur hingga ekonomi sehingga tidak lagi berpusat di Pulau Jawa melainkan bergeser menjadi Indonesia-sentris. Hal ini dilakukan guna untuk menutup *gap* kesenjangan yang melebar bertahun-tahun di negara ini.

Selain itu, pemindahan ibu kota ini memperhatikan pemerataan pembangunan khususnya dalam aspek infrastruktur agar semakin memperluas jangkauan wilayah Indonesia yang masih sangat potensial ini. Wilayah potensial di Indonesia yang masih sangat kaya akan kekayaan alam, seperti pertambangan, perairan, perhutanan, dan pertanian masih belum terjangkau secara optimal (akses logistik yang belum mumpuni, kualitas SDM yang belum terampil, aset pengolahan yang belum memadai, dan lainnya) sehingga pemindahan ibu kota ini juga diharapkan mampu membuka pintu akses Indonesia untuk mendorong peningkatan kekayaan negara yang tercermin dari Pendapatan Domestik Bruto atau PDB. Peningkatan ekonomi ini dapat mempengaruhi peningkatan APBN negara yang tentu akan menjadi penyokong perkembangan negara karena ketersediaan anggaran pembangunan yang kian meningkat.

Akselerasi transformasi digital dalam pembangunan IKN dituangkan menjadi suatu konsep *smart city* di mana seluruh akses dari berbagai wilayah Indonesia terbebas dari kesenjangan teknologi dan seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan publik secara digital yang merata dan maksimal. Selain itu, transformasi digital dalam pembangunan IKN berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara pesat khususnya di bidang ekspor karena semakin terjangkaunya akses distribusi, pemanfaatan ekonomi berbasis teknologi, dan peningkatan nilai produksi bisnis (*value added*).

## METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode kualitatif melalui studi literatur. Penelitian dari studi literatur ini bersifat analitis dan bertujuan untuk menganalisis mengenai literatur yang relevan dengan pembangunan infrastruktur ekonomi digital beserta dengan dampaknya yang akan terjadi pada ekonomi berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara dan negara Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan riset yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pencarian literatur secara sistematis menggunakan basis data akademis serta sumber terkait untuk dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi literatur menggunakan Teknik analisis konten terhadap literatur yang dipilih untuk dapat mengidentifikasi tema utama, konsep-konsep kunci, hingga pola hubungan antar variabel yang muncul dalam literatur penelitian ini. Tahapan dalam penyusunan artikel ilmiah ini, yaitu : (1) penentuan topik, (2) pencarian dan pengekplorasian literatur, (3) pengulasan literatur yang relevan, (4) penyajian data, (5) penulisan artikel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembangunan infrastruktur Ekonomi Digital di Ibu Kota Nusantara Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Negara Indonesia.

Dalam rangka melakukan pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, terdapat beberapa implementasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melibatkan beberapa aspek, mulai dari pembangunan jaringan internet yang memadai, pembangunan pusat data yang tepat, peningkatan dan pengembangan *platform e-commerce*, hingga membentuk *platform* bisnis digital yang mendukung. Diawali dengan pembangunan jaringan internet yang memadai, dimana dalam hal ini dapat dilakukan suatu pembangunan dan peningkatan dalam infrastruktur jaringan telekomunikasi tingkat tinggi yang dapat mendukung aktivitas masyarakat. Salah satunya yaitu dalam rangka mendukung konektivitas *broadband* yang cepat dan memadai, maka dapat melakukan investasi dalam teknologi 5G yang diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketersediaan jaringan. Akan tetapi, hal ini tetap perlu dipastikan bahwa akses jaringan data ini dapat tersebar luas secara merata ke seluruh golongan masyarakat agar tidak terjadinya kesenjangan digital. Implementasi lainnya yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara adalah dengan melakukan pembangunan pusat data modern yang canggih dengan tingkat keamanan yang tinggi dan terjaga. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengolahan data besar dan mendukung layanan *cloud*. Dengan adanya pusat data yang efisien seperti ini, maka dapat menjadi prioritas yang digunakan dalam meningkatkan keberlanjutan. Selain itu, perlunya dilakukan implementasi mengenai kebijakan keamanan data yang ketat dan memberikan solusi keamanan siber guna untuk melindungi data pribadi dan bisnis dari ancaman keamanan.

Berikutnya implementasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan pada *platform e-commerce* atau *platform* layanan belanja *online* dengan melakukan pemberian dukungan berkaitan dengan infrastruktur dan kebijakan yang dibuat dapat memudahkan bisnis *online* dijalankan di Indonesia. Hal ini dapat berkaitan dengan pelonggaran yang tidak perlu dan menyediakan insentif bagi pelaku usaha. Lalu juga dibutuhkannya pendorongan dalam penggunaan pembayaran digital untuk memfasilitasi transaksi *online*, dengan ini dapat menciptakan inovasi dalam sistem pembayaran yang dapat memberikan kemudahan dan keamanan bagi konsumen. Terakhir, yaitu dengan cara membangun inkubator dan ruang kolaborasi yang dapat digunakan untuk mendorong perkembangan *startup* dan bisnis digital lokal. Dukungan dan bantuan yang dapat diberikan yaitu melalui pemberian dana dan

menyediakan *mentorship* yang bertujuan membantu para pengembang bisnis digital yang inovatif semakin terdepan. Selain itu, menyediakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan pekerja dan pelaku bisnis. Hal yang dapat dilakukan, antara lain, pelatihan dalam menganalisis data, memberikan pelatihan untuk melakukan keamanan siber, dan pelatihan untuk menggunakan dan mengembangkan teknologi terkini. Dengan melakukan implementasi-implementasi tersebut secara efektif, Ibu Kota Nusantara baru diharapkan dapat menjadi sebuah pusat ekonomi digital yang kuat bagi negara Indonesia agar dapat memajukan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja secara luas, dan meningkatkan daya saing secara internasional, serta dapat memberikan kontribusi yang positif, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan teknologi yang berkelanjutan.

Dampak Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Digital di Ibu Kota Nusantara terhadap Pencapaian Pembangunan yang Berkelanjutan di Indonesia.

Setiap langkah pengembangan tidak terlepas dari dampak positif dan dampak negatif yang dapat terjadi akibat dari pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara. Dampak positif yang dapat dirasakan ini dapat berkaitan dengan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, terjadinya perluasan aksesibilitas di berbagai sektor, peningkatan sumber daya dan lingkungan yang lebih efisien, peningkatan pendidikan dan literasi digital, hingga peluang dalam memperluas bisnis negara Indonesia baik secara lokal maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi negara berpotensi meningkat signifikan jika pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan dengan adanya infrastruktur ekonomi digital dapat membantu masyarakat dan negara dalam meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi proses bisnis yang akan terjadi kedepannya, penggunaan dan pengolahan analisis data yang akan berjalan lebih baik dan aman, dan adanya integrasi teknologi yang canggih. Perluasan aksesibilitas di berbagai sektor juga dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital secara masif, baik dari akses ke wilayah kaya sumber daya hingga akses ke layanan keuangan dengan adanya sebuah inovasi finansial teknologi (*fintech*) yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya di daerah-daerah yang mengalami kendala atau kesulitan dijangkau oleh infrastruktur tradisional.

Keberadaan infrastruktur digital ini memungkinkan negara untuk dapat melakukan pengelolaan sumber daya lebih efisien, yaitu dengan menggunakan sistem *monitoring* dan *controlling* dengan menggunakan bantuan teknologi yang lebih canggih. Selain itu, infrastruktur digital ini juga dapat membantu negara dan pemerintah untuk dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan, yaitu seperti dalam pengelolaan transportasi yang efisien hingga pengurangan jejak emisi karbon. Kemudian, peningkatan terhadap pendidikan dan literasi digital yang lebih optimal karena adanya infrastruktur digital ini dapat mendukung model pendidikan jarak jauh bahkan dapat memfasilitasi akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah yang nantinya dapat meningkatkan literasi digital masyarakat dan membuka berbagai peluang pengembangan keterampilan di era digital tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak hanya itu, peluang untuk memperluas bisnis secara lokal dan internasional dengan adanya infrastruktur ekonomi digital ini dapat memberikan peluang kepada bisnis mikro dan kecil untuk dapat tumbuh dan bersaing di pasar global dan negara Indonesia dapat memperluas pasar hingga skala internasional dan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat global. Hal ini berpotensi menggerakkan ekonomi negara dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Tidak hanya dampak positif, namun pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan, antara lain, dapat membawa tantangan dalam ketidaksetaraan akses digital, ancaman terhadap perlindungan privasi dan keamanan siber, terjadinya ketergantungan terhadap teknologi, hingga terjadinya ketidakstabilan pasar kerja. Timbulnya ketidaksetaraan digital yang disebabkan karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sepadan merata dalam penggunaan teknologi digital seperti akses

internet, perangkat, hingga literasi digital. Di samping itu, ancaman dari keamanan siber dan privasi juga berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran privasi, seperti pencurian data, penyalahgunaan data, pemalsuan data, dan pelanggaran privasi lainnya yang dapat merugikan segala pihak masyarakat. Lalu, timbulnya ketergantungan yang berlebihan pada teknologi digital yang dapat membuat masyarakat dan bisnis mengalami gangguan teknis. Selain itu, adanya transformasi digital juga dapat menyebabkan perubahan yang cepat dalam kebutuhan pasar kerja akibat dari penyebaran informasi yang masif sehingga hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dan membutuhkan penyesuaian keterampilan yang berjalan dengan cepat.

#### Hambatan dan Tantangan yang Terjadi Dalam Melakukan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Digital di Ibu Kota Nusantara.

Dalam Pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara, ada beberapa hambatan dan tantangan yang mungkin terjadi, yaitu pengaruh aspek investasi dan pendanaan, ketergantungan dengan teknologi asing, ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang berlaku, dan kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dan terampil di Indonesia. Dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara ini dibutuhkan modal dana yang cukup besar. Hal ini memerlukan tindakan antisipatif untuk mengatasi tantangan pendanaan yang mungkin akan timbul kedepannya dalam melakukan pembangunan infrastruktur ekonomi digital, terutama dalam pembangunan proyek-proyek besar, sehingga perlunya mencari model pendanaan yang berkelanjutan untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur digital agar proyek pembangunan ini dapat terus dijalankan dan berhasil tanpa mengabaikan rasio hutang negara. Kemudian, hambatan dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital ini, yaitu ketergantungan dengan teknologi asing. Pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara bukanlah hal yang mudah karena memerlukan aset dan sumber daya yang mumpuni sehingga negara Indonesia membutuhkan bantuan alat teknologi yang berasal dari luar negeri yang dapat memproduksi alat teknologi yang canggih yang dapat mendorong pengembangan teknologi digital di Ibu Kota Nusantara. Hal ini menjadikan Indonesia perlu bijaksana dalam memilih *make or buy decision* dengan memperhatikan aspek kualitas dan kapabilitas produksi maupun pengembangan. Tidak hanya itu, tata kelola negara tidak lepas regulasi dan kebijakan yang berlaku. Pembangunan masif menuntut kebijakan ditetapkan dengan cepat dan tepat pula.

Selain itu, negara Indonesia sendiri masih mengalami kekurangan tenaga kerja yang terampil khususnya dalam bidang teknologi digital dan informasi. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya pelatihan dan keterampilan digital di Indonesia, yaitu masih kurangnya program pelatihan dan sertifikasi keterampilan digital yang dibutuhkan oleh industri ekonomi digital. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur ekonomi digital sehingga perlunya antisipasi dalam bentuk perekrutan tenaga kerja yang terampil baik dari lokal maupun dari tenaga asing dengan menganut kebijakan *geocentric staffing*. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin terjadi dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara, maka dibutuhkannya kolaborasi yang kuat yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, sektor swasta, bahkan hingga masyarakat sipil. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai wujud tindakan, antara lain, perencanaan investasi yang tepat seperti mengadakan *foreign direct investment* dari negara-negara maju seperti Singapore, Jerman, dan Jepang untuk mendapatkan suntikan dana segar maupun investasi berupa aset teknologinya, menetapkan regulasi dan kebijakan yang tepat, dan menciptakan strategi pengembangan yang berkelanjutan yang tepat secara menyeluruh tanpa mengabaikan lapisan masyarakat tertentu.

#### Peran Pemerintah Dalam Mendorong Infrastruktur Ekonomi Digital dan Kebijakan Pemerintah yang Dapat Mempengaruhi Keberlanjutan Ekonomi.

Pemerintah sebagai salah pengelola sekaligus pemegang kuasa tata Kelola negara memiliki beberapa peran yang dapat dilakukan dalam mendorong infrastruktur ekonomi digital di Ibu Kota

Nusantara, yaitu dimulai dengan melakukan pembangunan infrastruktur digital melalui pembangunan jaringan *broadband*, *5G*, dan menjadi pusat data yang kuat di Ibu Kota Negara baru dengan memastikan ketersediaan akses internet yang merata di seluruh wilayah Ibu Kota Nusantara agar dapat mendukung pembangunan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan keterampilan digital bagi seluruh tenaga kerja agar dapat menggunakan ekonomi digital dengan baik dan tepat dan juga berkolaborasi dengan perusahaan unggul berpengalaman di bidang teknologi seperti Microsoft, Meta, dan lainnya. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong konsep *smart city* dengan penggunaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup di Ibu Kota Nusantara. Pemerintah juga dapat melakukan penggabungan dan penggunaan teknologi digital yang dapat digunakan untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan, seperti menjadi solusi transportasi yang ramah lingkungan dan minim jejak emisi karbon. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan teknologi digital serta melibatkan masyarakat dalam melakukan pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur ekonomi digital yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara.

Regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang diharapkan dapat mendukung perkembangan dari inovasi di sektor ekonomi digital dengan memperhatikan keamanan dan privasi data yang ada. Selain itu, pemerintah juga dapat menetapkan sebuah kebijakan perlindungan investasi yaitu dengan cara membentuk sebuah kebijakan yang dapat memberikan perlindungan dan insentif, khususnya bagi para investor yang ikut berperan dan turut serta dalam mendukung pembangunan ekonomi digital di Ibu Kota Nusantara. Dengan peran dan kebijakan tersebut, pemerintah dapat membentuk lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia yang pada nantinya akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara. Hal ini dapat menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia secara global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia merata.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan dengan meninjau berbagai penelitian terdahulu dan rancangan pengembangan Ibu Kota Nusantara dapat disimpulkan bahwa proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini bukanlah suatu keputusan dan kebijakan mudah karena sangat banyak aspek dan sektor yang terpengaruh. Transformasi digital dalam pembanguna Ibu Kota Nusantara sangat membutuhkan kolaborasi dan inklusi dari negara-negara lain sebagai pendukung yang mendorong Indonesia berhasil dalam pembangunan infrastruktur ekonomi digital ini. *Foreign Direct Investment* dapat menjadi salah satu strategi pendanaan yang efisien dan optimal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara inii, Negara Indonesia yang belum mampu untuk melakukan *make decision* karena sumber daya yang belum memadai dapat mempervanyak keputusan adaptasi teknologi negara lain guna mendukung keberhasilan pembangunan yang berkualitas.

Akselerasi transformasi digital sangat berpotensi membuka peluang bisnis dan ekonomi yang menguntungkan bagi Indonesia. Salah satunya dapat diwujudkan melalui digitalisasi pengelolaan sumber daya alam seperti komoditas yang dimana pengelolaannya dilakukan dengan cara mengadaptasi teknologi negara maju seperti kemampuan penyulingan minyak negara Singapore sehingga Indonesia bisa menghasilkan bahan bakar minyak yang telah diolah dan menambah *value added* dari komoditas ekspor tersebut. Lalu, kegiatan ekspor tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat usaha mikro dan kecil melalui pemanfaatan ekonomi digital tanpa memerlukan lahan atau gudang pribadi. Pemindahan ibu kota negara ini tidak lepas dari seluruh warga negara dari berbagai lapisan masyarakat yang turut berperan menjadi agen transformasi. Kesadaran dan kesiapan seluruh pihak sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan pilar-pilar pembangunan ini agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang merata dan menutup *gap* kesenjangan masyarakat.

## REFERENCES

- Alfiani, M., Anisa, M. J., Eka, A. O., & Husnul, K. (2022). Peran ekonomi digital bagi perkembangan pasar modern di Indonesia. *Jurnal Al-Aflah*, 1(2), 124–133.
- Almatrodi, I., & Skoumpopoulou, D. (2023). Organizational Routines and Digital Transformation: An Analysis of How Organizational Routines Impact Digital Transformation Transition in a Saudi University. *Systems*, 11(5). <https://doi.org/10.3390/systems11050239>
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Evdokimova, Y., Egorova, E., & Shinkareva, O. (2021). Building a Sustainable Economy: Opportunities and Prospects. *Proceedings of the Second Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2021)*, 195(Ift), 173–176. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.211118.032>
- Gunawan, C., & Somantri, B. (2023). *Financial inclusion in MSME: the role of technology adoption and digital economy*. 25(1), 7–14.
- Herawati, M., & Djunaedi, A. (2020). Ketersediaan Data dalam Mendukung Smart City Readiness di Kota Surakarta. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 63–73. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.63-73>
- Kementerian PPN, & Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. Naskah Akademik.
- Margiansyah, D. (2020). Revisiting Indonesia's economic diplomacy in the age of disruption: Towards digital economy and innovation diplomacy. *Journal of ASEAN Studies*, 8(1), 15–39. <https://doi.org/10.21512/jas.v8i1.6433>
- Wang, Y.-Y. (n.d.). *Sustainable Economic Development* (pp. 123–133).